

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari kebutuhan akan ruang terbuka yang berfungsi penting bagi ekologis, sosial ekonomi, dan evakuasi. Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa ketersediaan ruang terbuka di setiap kota harus sebesar 30 persen dari luas kota tersebut. Namun sebagian besar kota-kota di Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan akan ruang terbuka sebagai syarat penataan ruang perkotaan. Hal ini disebabkan oleh makin pesatnya pembangunan daerah dan makin tingginya pertumbuhan penduduk mengakibatkan ruang terbuka yang ada harus digunakan hanya untuk kegiatan-kegiatan sosial ekonomi saja. Tidak terkecuali Kota Gorontalo dalam perkembangannya sekarang ini, timbul ruang-ruang komunal lain akibat dari kurangnya ruang-ruang luar yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Kota menjadi pusat pembangunan sektor formal, maka kota dipandang lebih menjanjikan bagi masyarakat desa. Kota bagaikan mempunyai kekuatan magis yang mampu menyedot warga desa, sehingga terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kondisi tersebut di atas dikenal dengan teori faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*) dalam urbanisasi. Akan tetapi kota tidak seperti apa yang diharapkan kaum migran. Tenaga kerja yang banyak tidak bisa sepenuhnya ditampung sektor formal. Lapangan kerja formal yang tersedia

mensyaratkan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu yang sifatnya formal, sehingga tenaga kerja yang tidak tertampung dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya memilih sektor informal¹.

Fakta yang dapat dilihat adalah adanya ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja, serta adanya sektor informal yang bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja, sehingga dapat dikatakan adanya sektor informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja². Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di perkotaan adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan adanya keterbatasan lapangan kerja di sector formal, pedagang kaki lima menjadi pilihan yang termudah untuk bertahan hidup. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari sektor informal yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat, bergantung pada sumber daya lokal dan skala usaha yang relatif kecil.

Kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negative bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Akan tetapi adanya kebutuhan terhadap pedagang kaki lima oleh masyarakat menjadikan keberadaan para pedagang kaki lima pun semakin banyak. Masyarakat terutama yang kelas bawah masih membutuhkan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau. Dengan demikian, merebaknya jumlah

¹ Aris Sulistiyo Budi, Tesis: Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL Serta Persepsi Masyarakat Sekitar Kota Pemalang, Semarang; Universitas Diponegoro, 2006, halaman 1 - 2

² Tadjudin Noor Efendi, Sumber Daya Manusia: Peluang Kerja dan Kemiskinan, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000, halaman 46

PKL bukan semata-mata karena keinginan para pedagang tadi untuk memperoleh pendapatan (*push factors*), tetapi lebih karena tuntutan pasar yang membutuhkan jasa PKL (*pull factors*)³. Disamping itu jenis usaha ini juga memberikan dampak ikutan yang menguntungkan (*positive spillovers*) seperti mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, membantu proses daur ulang beberapa jenis sampah, serta menjadi alternatif terbaik bagi kelompok berdaya beli rendah.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pedagang kaki lima mempunyai sisi positif, disamping sisi negatifnya. Hal ini merupakan dilema bagi pemerintah kota dalam mengatasi menjamurnya pedagang kaki lima. Disatu sisi keberadaan pedagang kaki lima dapat menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal sehingga dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Disisi lain, keberadaan pedagang kaki lima memberikan kesan kotor, kumuh dan tidak tertib terhadap lingkungan perkotaan yang tidak diinginkan oleh pemerintah kota dalam menata kotanya. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya saja, melainkan juga terjadi di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor formal juga menjadi salah satu sebab bertambahnya sektor informal. Semakin banyak para pedagang kaki lima di pusat-pusat keramaian kota menjadikan pemandangan kota bertambah tidak sedap dipandang lagi.

³ Aris Sulistiyo Budi, 2006, *ibid.*

Kota Gorontalo yang merupakan Ibu Kota Provinsi Gorontalo dan berbatasan langsung dengan daerah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Teluk Tomini secara administratif sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 terbagi menjadi 6 kecamatan dan 49 kelurahan dengan luas wilayah 79.03 Km². Pada tahun 2011 sampai dengan sekarang, jumlah kecamatan di Kota Gorontalo menjadi 9 kecamatan dan 50 kelurahan⁴.

Pada sektor informal di Kota Gorontalo masih memegang peranan penting menampung angkatan kerja, terutama angkatan kerja muda yang masih belum berpengalaman atau angkatan kerja yang pertama kali masuk pasar kerja. Keadaan ini dapat mempunyai dampak positif mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Tetapi di segi lain menunjukkan gejala tingkat produktivitas yang rendah, karena masih menggunakan alat-alat tradisional dengan tingkat pendidikan serta keterampilan yang relatif rendah.

Mengingat peran sektor informal yang cukup positif dalam proses pembangunan, sudah sewajarnya nasib para pekerjanya dipikirkan. Beberapa kebijakan, baik langsung maupun tidak, untuk membantu pengembangan masyarakat melalui pembinaan kegiatan usaha pekerja di sektor informal memang sudah dilakukan. Namun ada kecenderungan kegiatan ekonomi di sektor informal dan nasib pekerja sektor informal belum banyak mengalami perubahan. Tanpa bermaksud mengurangi arti pentingnya kebijakan yang telah ada, kebijakan yang biasa diberikan kepada pengusaha besar mungkin dapat dikurangi, kemudian prioritas diberikan pada kegiatan sektor informal dan memihak pada kepentingan

⁴ Badan Pusat Statistik, Statistik Daerah Kota Gorontalo, 2014, halaman 2

masyarakat. Sektor informal yang apa bila diolah dengan baik maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, retribusi dari sektor perdagangan ini dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah yang nantinya akan dapat menambah pendapat daerah.

Melihat fenomena keberadaan PKL yang banyak di daerah Kota Gorontalo, keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu potensi bagi pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri. Kehadiran PKL dijadikan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga berfungsi untuk masyarakat ekonomi lemah karena mereka yang tidak mempunyai modal untuk berbelanja di tempat seperti Supermarket, Mall dan pertokoan yang megah sehingga alternatif tempat yang dipilih untuk berbelanja adalah pada PKL terjangkau harganya.

PKL di Kota Gorontalo selain berasal dari Gorontalo sendiri, juga berasal dari luar Gorontalo seperti Manado, Kotamobagu, Bitung, dan bahkan adapula yang berasal dari Sulawesi Selatan. Keberadaan mereka tidak hanya menimbulkan beberapa masalah bagi pemerintah dan masyarakat karena menggunakan ruang publik untuk berjualan sehingga mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu diperlukan kinerja pemerintah daerah untuk memberikan ruang kepada para pekerja sektor informal tersebut untuk mendapatkan tempat yang layak bagi lapak-lapak mereka untuk bekerja dan menjadi kewajiban daerah untuk melakukan pembinaan dan penataan PKL di daerah perkotaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pasal 3

ayat 1 bahwa pembinaan dalam penataan PKL meliputi; 1) pendataan, 2) perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sector informal, 3) fasilitasi akses permodalan, 4) penguatan kelembagaan, 5) pembinaan dan bimbingan teknis, 6) fasilitasi kerjasama antar daerah, dan 7) mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha. Kemudian pada pasal 2 berbunyi program penataan dan pemberdayaan PKL disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, maka daerah berkewajiban untuk menata dan membina PKL demi untuk peningkatan kesejahteraan mereka.

Dengan pengembangan pembangunan daerah, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera secara ekonomi dan peduli terhadap kegiatan ekonomi di sector informal dengan tetap memperhatikan kondisi ruang terbuka yang ada di Kota Gorontalo. Salah satu lokasi yang menjadi pusat kegiatan ekonomi PKL di Kota Gorontalo terdapat di Pasar Setya Praja. Pasar Setya Praja adalah merupakan pusat perdagangan dimana banyak terdapat pertokoan-pertokoan yang menjual berbagai kebutuhan sandang masyarakat Kota Gorontalo. Selain terdapatnya pertokoan, juga terdapat banyak lapak PKL yang pada umumnya digelar oleh pedagang di sepanjang jalan trotoar depan area pertokoan. Oleh karena tidak tertanya lapak-lapak milik PKL, maka sejak tahun 2010 oleh pemerintah Kota Gorontalo telah dilakukan penataan lapak-lapak tersenut dengan mendirikan lapak-lapak yang semi permanen untuk digunakan oleh PKL dalam aktifitasnya. Permasalahan yang muncul dalam proses implementasinya antara lain yang diakibatkan oleh sikap Pemerintah Kota

Gorontalo yang terlihat masih mendua, di satu sisi menyatakan pedagang kaki lima sebagai wiraswasta yang perlu dibina, di sisi lain pada saat-saat tertentu menginstruksikan penertiban dengan dalih kebersihan dan keindahan kota tanpa memberikan penyelesaian yang tepat.

Berdasarkan kondisi yang diuraikan pada bagian atas tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kondisi PKL di Kota Gorontalo. Berbagai masalah yang dihadapi oleh PKL di Kota Gorontalo menjadi faktor utama perhatian penulis, selain masalah tentang perhatian pemerintah daerah terhadap kehidupan para PKL di Kota Gorontalo. Berdasarkan masalah-masalah tersebut, penulis mengangkat judul skripsi “Sektor Informal Di Kota Gorontalo” (Studi Tentang Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Pasar Setya Praja Kota Gorontalo).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang di atas, maka penulis rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana kondisi kehidupan sosial ekonomi Pedagang Kaki Lima di Pasar Setya Praja Kota Gorontalo?
- 1.2.2 Bagaimana upaya pemerintah dalam menata dan membina Pedagang Kaki Lima di Pasar Setya Praja Kota Gorontalo?
- 1.2.3 Bagaimana persepsi masyarakat tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Setya Praja Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui kondisi kehidupan sosial ekonomi Pedagang Kaki Lima di Pasar Setya Praja Kota Gorontalo.
- 1.3.2 Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menata dan membina Pedagang Kaki Lima di Pasar Setya Praja Kota Gorontalo.
- 1.3.3 Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Setya Praja Kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Untuk menjadi pemahaman sektor informal (pedagang kaki lima) di kota Gorontalo secara umum.
- 1.4.2 Dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca yang tertarik pada topik yang diteliti oleh penulis.
- 1.4.3 Dapat dipergunakan sebagai referensi oleh penulis lain dalam menulis skripsi yang berhubungan dengan topik seperti yang diteliti oleh penulis.